

**PENETAPAN HARGA JUAL EMAS TANPA SURAT DALAM  
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Toko Emas di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus)**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**Nining Mutiara**

**NPM : 1621030342**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1442 H / 2020**

## ABSTRAK

Emas dan Perak adalah dua logam mulia yang sering dijadikan simbol dari kekayaan bukan digunakan sebagai perhiasan saja tetapi juga digunakan sebagai investasi. Konsumsi emas di Indonesia mayoritas digunakan sebagai emas perhiasan. Dari data *WorldGoldCouncil*, konsumsi emas untuk perhiasan adalah 95% dari keseluruhan emas di Tanah Air. Membeli emas disertakan dengan adanya surat perhiasan, sehingga jika surat itu hilang maka tidak bisa membuat surat itu kembali. Tanpa surat harga emas bisa turun, karena surat emas tersebut digunakan sebagai tanda bukti kepemilikan emas. Tanpa adanya surat emas maka harga emas akan turun bahkan ada juga toko emas yang tidak menerima menjual emas tanpa surat dipasar Kota Agung Tanggamus. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut, Bagaimana penetapan harga jual emas tanpa adanya surat pada beberapa toko emas di pasar Kota Agung, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga jual emas tanpa surat pada toko emas di pasar Kota Agung. Tujuan dari penelitian adalah, Untuk mengetahui penetapan harga jual emas tanpa surat pada beberapa toko emas di pasar Kota Agung, dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap potongan harga emas tanpa adanya surat. Penelitian ini adalah penelitian (*field research*) atau penelitian lapangan dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan hal ini dengan turun langsung mengamati serta melihat langsung praktik di Pasar Kota Agung. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara dan pengamatan, kemudian peneliti melakukan analisis dengan metode deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir menggunakan metode induktif. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai pelaksanaan jual beli potongan harga jual emas tanpa surat, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik potongan harga jual emas tanpa surat belum sesuai dengan Hukum Islam karena dalam pelaksanaannya terdapat salah satu pihak yang dirugikan, sedangkan dalam jual beli tidak boleh ada unsur keterpaksaan dan keraguan, dan ada unsur suka rela. Hal ini pula masuk kedalam unsur riba karena didalam praktiknya pihak toko mengambil banyak keuntungan dari harga penjualan emas pada umumnya, dan merugikan pihak yang menjual emas, dan terdapat unsur *gharar* didalam praktiknya yaitu ketidakjelasan kedua belah pihak pada saat transaksi jual beli di awal pembelian emas, toko emas tidak menjelaskan tentang pentingnya surat dan akibat jika surat itu hilang. Dan juga ada keraguan oleh pihak toko kepada penjual emas terhadap emas yang akan dijual tersebut, apakah memang benar emas yang akan dijual adalah emas miliknya sendiri atau emas hasil curian, karena setiap penjual emas selalu berargumen bahwa emas tersebut miliknya. Dalam pandangan Ulama emas dan perak dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (barang ribawi), maka dari itu dalam jual beli emas diharuskan dalam kehati-hatian karena emas adalah salah satu barang ribawi.

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : NINING MUTIARA

NPM : 1621030342

Jurusan/Prodi : Muamalah (HukumEkonomiSyari'ah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penetapan Harga Jual Emas tanpa Surat Dalam Tinjauan Hukum Islam” Adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukdan di sebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung,Maret 2020

Penulis,

Nining Mutiara

Npm :1621030342



## **PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **PENETAPAN HARGA JUAL EMAS TANPA SURAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Toko Emas di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus).**  
Nama : **Nining Mutiara**  
NPM : **1621030342**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**  
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**

## **MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag Fathul Mu'in., S.H.I., M.H.I**  
**NIP. 197111061998032005 NIP.-**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letnan. H. Endro Suratmin, Sukarama 1, Bandar Lampung 35131

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **PENETAPAN HARGA JUAL EMAS TANPA SURAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Toko Emas di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus)**. Disusun oleh : **Nining Mutiara, NPM : 1621030342, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**. Telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 24 Agustus 2020**.

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua : Khoiruddin. M.S.I.** (.....)

**Sekretaris : Arif Fikri. S.H.I., M.Ag.** (.....)

**Penguji I : Drs. Henry Iwansyah. M.A.** (.....)

**Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli. S.H., S.Ag., M.Ag.** (.....)

**Penguji III : Fathul Mu'in. S.H.I., M.H.I.** (.....)

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**



**Khairuddin Tahmid., M.H.**

**NIP. 196210221993031002**

## MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّسِيِّينَ وَلِصَدِّيقَيْنِ  
وَالشُّهَدَاءِ — رواه الترمذی

"Dari Abi Sa'id, dari Nabi saw bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada". (HR. Tirmidzi).





## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ibu dan Ayah tercinta, Ayah Maman dan Ibu Zahra, yang selalu mendoakan serta senantiasa mendukung dan memotivasi selama ini, Adik-adikku tersayang Fikri Irawan dan Sherli Amelia, yang selalu mendoakan memberi semangat dan menghibur. Terimakasih banyak atas semua pengorbanan yang telah diberikan selama ini.



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Nining Mutiara. Dilahirkan pada tanggal 01 Mei 1998, anak pertama dari tiga bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Maman Efendi dengan Ibu Ira Zahra. Pendidikan dimulai, TK Negri Pembina Kota Agung selesai tahun 2004, Sekolah Dasar Negri SDN 1 Kampung Baru selesai tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama, MTS AL-Hikmah Bandar Lampung, selesai tahun 2013, Sekolah Menengah Atas MA AL-Hikmah Bandar Lampung, selesai tahun 2016 dan mengikuti perguruan tingkat tinggi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negri (UIN) Raden Intan Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra.

Bandar Lampung, 14 Juli 2020,

Yang membuat,

Nining Mutiara



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Penetapan Harga Jual Emas Tanpa Surat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Toko Emas di Pasar Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus)" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Muamalah ( Hukum Ekonomi Syariah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, S.H M.H selaku wakil dekan II Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

5. Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I., selaku Sekertaris Jurusan Muamalah FakultasSyari'ah UIN RadenIntan Lampung..
6. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.Ag , selaku Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. dan selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk peyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Fathul Muin,.S.H.I.,M.H.I, selaku Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) , teima kasih atas ilmu dan didikan yang telah di berikan.
9. Bapak dan Ibu Staff Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
10. Kedua orangtua ku, Ibu Zahra dan Ayah Maman yang tak henti-hentinya selalu mendoakan dan mensuport, sampai saat ini.
11. Adik-adikku tercinta, Fikri Irawan, Sherli Amelia, yang selalu menghibur dan mendoakan.
12. Sahabat tersyangku, Santo Yudit Ryan Alvin yang selalu mengingatkan, mensuport, memarahiku pada saat malas mengerjakan skripsi.
13. Sahabat tersayang seperjuangan skripsi, yang selalu mengingatkan mengantar, menemani kemanapun, Elvia Suci Meilantika, dan Dewi Masdaleny.

14. Teman-teman seperjuangan Muamalah G, yang sekarang sedang berjuang mengerjakan skripsi.
15. Keluarga kedua, KKN Nita Paramita, Sobriyah Nikmah, Dewi Astuti, Apriliana Devi, Yeni Anggraini, Elisa Efriani, bang Edo, Wawan, Dimas, Handi, Didik, Rizki. Terima kasih untuk kalian yang telah menghibur dan memberikan pengalaman yang sangat berharga.
16. Terimakasih kepada teman-teman kerja, Kobar Grill, yang telah memberikan banyak pengalaman yang sangat bermanfaat untuk bekal saat bekerja nanti. Pak Adi selaku manager, ka Ryan selaku Kapten, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
17. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku.  
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dan ucapan terimakasih. Demikian penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya Amin.

Bandar Lampung, Februari 2020

Penulis

Nining Mutiara

1621030342



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN .....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATAPENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian .....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian .....	8
G. Signifikasi Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori	
1. Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	15
a. Pengertian Jual Beli .....	15
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	17
c. Jual Beli yang dilarang Dalam Islam.....	21
d. Riba.....	28
e. Gharar.....	36
f. Pandangan Hukum Islam Terhadap Emas.....	42
B. Tinjauan Pustaka .....	50
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Toko Emas Pada Pasar Kota Agung.....	50
1. Gambaran Lokasi Pasar Kota Agung.....	53
2. Sejarah Singkat Toko Emas di Pasar Kota Agung.....	54
3. Potongan Harga Emas di Pasar Kota Agung.....	61
B. Praktik Jual Emas Tanpa Surat di Pasar Kota Agung.....	61
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Penetapan Harga Jual Emas Tanpa Surat Pada Toko Emas di Pasar Kota Agung.....	72
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potongan Harga Jual Emas Tanpa Surat di Pasar Kota Agung.....	74

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	71
B. Rekomendasi.....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan memahami proposal ini, maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterpretasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu **“Penetapan Harga Jual Emas Tanpa Surat Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Pada Toko Emas di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus).**

Adapun penegasan arti dari judul skripsi ini adalah:

1. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya) atau tetapan suatu yang tidak dapat diubah, permanen.<sup>1</sup>
2. Harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.<sup>2</sup>
3. Jual Beli dalam bahasa Arab sepadan dengan kalimat *ba'i* dari kata dasar *ba'a-yabi'u-ba'i* yang artinya secara bahasa berarti menerima

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa), h. 1457.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 482.



sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah *ba'i* yaitu saling tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan.

4. Emas merupakan tambang elok, Allah sarati padanya banyak manfaat yang tak terdapat pada aneka tambang lain. Lantaran kelangkaan dan keindahannya, bangsa manusia telah menjadikannya uang dan nilai tukar bagi segala sesuatu sejak kurun-kurun lalu. Dari sisi ini, Syariat memandang emas dengan pandangan tersendiri, dan mengibaratkannya sebagai suatu kekayaan alam yang hidup.<sup>3</sup>
5. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>4</sup>
6. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan atau Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Berdasarkan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian yang membahas tentang potongan harga terhadap jual emas tanpa surat di pasar Kota Agung Tanggamus.

---

<sup>3</sup> Yusuf Qsardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 242.

<sup>4</sup> Raminto dan Septi Antik Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h. 2.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan memilih judul “ Penetapan Harga Jual Emas Tanpa Surat Dalam Tinjauan Hukum Islam ”(Studi Kasus Toko Emas di pasar Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus)” adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Obyektif**

Penelitian ini cukup menarik untuk diteliti, karena yang melakukan penelitian tentang Penetapan harga jual emas tanpa surat ini masih sangat terbatas, sebagian hanya membahas mengenai hukum jual beli emas, dan kredit emas.

### **2. Alasan Subyektif**

Judul ini sesuai dengan spesialisasi keilmuan penulis yaitu pada jurusan hukum Islam, yang diperkuat referensi, maupun media elektronik lainnya.

Referensi cukup tersedia yaitu Al-Qur'an dan Hadits buku-buku Fiqh Muamalah yang terkait, Karya Ilmiah, Artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Lokasi penelitian mudah dijangkau karena lokasi tersebut adalah pasar tradisional memang menjadi pusat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dengan transaksi jual beli.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Arab pada masa Rasulullah, melakukan kegiatan tukar menukar dengan emas dalam bentuk ‘*dinar*’ dan perak dalam bentuk

‘*dirham*’. Kedua mata uang ini mereka peroleh dari kerajaan-kerajaan tetangga yang besar. *Dinar* dipakai pada kebanyakan penduduk kerajaan Romawi Bizantium, sedangkan *dirham* pada kerajaan Persia. Dirham ini mempunyai banyak timbang, besar dan kecil, ringan dan berat. Karena itu penduduk Makkah pada zaman Jahiliyah tidak mempergunakannya secara menyeluruh. Tapi mereka mempergunakannya dalam timbangan semacam potongan atau leburan perak. Mereka mempunyai timbangan-timbangan yang mempunyai nama khusus. Diantaranya ‘*rithl*’ (12 *uqiyah*), sedangkan 1 *uqiyah* seharga 40 *dirham*. Dan ‘*nasy*’ (20 *dirham* atau  $\frac{1}{2}$  *uqiyah*), dan ‘*nawat*’ seharga 5 *dirham*.<sup>5</sup>

Nabi Muhammad S.A.W., menetapkan untuk memakai timbangan mata uang Makkah, seperti dalam sabdanya: “*Timbangan adalah timbangan mata uang penduduk Makkah.*” Dan beliau mewajibkan zakat harta dalam *dirham* dan *dinar*, maka emas dan perak dianggap mata uang yang disyariatkan.<sup>6</sup>

Emas dan Perak adalah dua logam mulia yang sering dijadikan simbol dari kekayaan bukan digunakan sebagai perhiasan saja tetapi juga digunakan sebagai investasi. Konsumsi emas di Indonesia mayoritas digunakan sebagai emasperhiasan. Dari data *World Gold Council*, konsumsi emas untuk perhiasan adalah 95% dari keseluruhan emas di Tanah Air.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 243-244.

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> Ella Syafputri, *Investasi Emas, Dinar, dan Dirham*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h, 51-52.



Membeli emas disertakan dengan adanya surat perhiasan emas dalam bentuk kwitansi sehingga jika surat itu hilang maka tidak bisa membuat surat itu kembali. Tanpa surat harga emas bisa turun, karena surat emas tersebut digunakan sebagai tanda bukti kepemilikan emas. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap turunnya harga jual emas ketika surat hilang, bahkan ada juga toko emas yang tidak menerima menjual emas tanpa surat, yang mana surat menjadi penentu hak kepemilikan. Emas dan Perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (barang ribawi)<sup>8</sup>. Asal makna ‘riba’ menurut bahasa Arab ialah lebih (bertambah). Adapun yang dimaksud disini menurut istilah syara’ adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara’, atau terlambat menerimanya.

Dijelaskan dalam Q.S . Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

<sup>8</sup> Vian Prasetyo, *Studi Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 (Tentang Kebolehan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, IAIN Walisongo, 2013).*

Barang-barang yang berlaku riba padanya ialah emas, perak, dan makanan yang mengenyangkan atau yang berguna untuk mengenyangkan misalnya garam. Jual beli barang tersebut, kalau sama jenisnya seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum, diperlukan tiga syarat: tunai, serah terima, dan sama timbanganya.

Dalam sebuah hadits dijelaskan, sebagai berikut:

Hadist Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ  
مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: "(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai." (Hadits riwayat Muslim)<sup>9</sup>.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk mengambil judul "Penetapan Harga Jual Emas Tanpa Surat dalam Tinjauan Hukum Islam", yang mana dijelaskan hadits di atas, dalam jual beli emas harus sama, sejenis, dan tunai, atau dengan kata lain harus seimbang atau sebanding. Namun dalam penjualan emas tanpa surat terdapat potongan harga emas yang cukup besar, yang dilakukan oleh salah satu pihak dan dapat merugikan pihak lain.

<sup>9</sup> Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhori-Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 753.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dari pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi di lapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah penetapan harga jual emas tanpa surat dalam tinjauan hukum Islam.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, Dapat dirumuskan permasalahan nya sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan harga jual emas tanpa adanya surat pada toko emas di pasar Kota Agung Tanggamus?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga jual emas tanpa surat pada toko emas di pasar Kota Agung?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui penetapan harga jual emas tanpa surat pada beberapa toko emas di pasar Kota Agung
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap turunya harga emas tanpa adanya surat pada toko emas di pasar Kota Agung.

#### **G. Signifikansi Penelitian**

1. Kegunaan teoritis



Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai nilai harga jual emas tanpa surat. Dan bagaimana menurut pandangan Islam terhadap kasus tersebut.

## 2. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, masyarakat, konsumen, pemerintah, terkhusus kepada masyarakat yang sering membeli perhiasan emas yang hanya sekedar untuk dipakai saja ataupun sebagai investasi, karna masih banyak dari masyarakat yang belum tau bagaimana pandangan hukum Islam terhadap harga jual emas tanpa surat tersebut. Hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan prosedur penelitian

Dilihat dari kajian, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung kelapangan dengan melihat lebih dekat objek yang akan diteliti.<sup>10</sup> Di samping itu, peneliti juga menyertakan penelitian Pustaka (*library research*) meskipun data yang nantinya diperoleh sebagian besar dari lapangan tetapi, data dari pustaka pun sangat berperan penting sebagai acuan teori yang nantinya akan digunakan dan

---

<sup>10</sup> Susiadi, *metodologi penelitian*, (Bandar Lampung, pusat penelitian dan penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.

dijadikan dasar-dasar penelitian. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti.<sup>11</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode deskriptif nanalisis kualitatif dengan pendekatan berfikir menggunakan metode induktif, Berpikir induktif ialah suatu proses dalam berfikir yang berlangsung dari khusus menuju ke yang umum. Orang mencari ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu dari berbagai fenomena, kemudian menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri itu terdapat pada semua jenis fenomena.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data skunder

#### 1).Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian<sup>12</sup>, yaitu kepada beberapa toko emas, serta pembeli yang ingin menjual emas tanpa surat di pasar Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Selain itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini Al-Quran dan Hadistt.

<sup>11</sup> Muhammad Nasir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 63.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung, Alfabeta,2014), h. 80.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antar lain buku-buku fiqh muamalah terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2). Data Skunder

Data skunder yaitu data atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

2. Partisipan dan Tempat Penelitian

Penelitian bersifat kualitatif memilih lokasi atau partisipan tertentu dengan tujuan agar mereka membantu peneliti memahami masalah dan pertanyaan penelitian :

a. Populasi dan Sampel

1). Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik

kesimpulan.<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan dari subyek penelitian, populasi terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, peristiwa sebagai sumberdata yang memiliki karakteristik tertentu yang diadakan suatu penelitian.<sup>14</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah 5 toko emas yang ada di pasar Kota Agung, dan 10 yang ingin menjual emas tanpa surat.

## 2). Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya, tetapi bukan populasi itu sendiri.<sup>15</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah toko emas yang berada di pasar Kota Agung dan beberapa pembeli yang menjual emas tanpa surat.

### b. Setting (lokasi riset)

Lokasi tempat peneliti ialah toko emas yang berada di pasar Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

### c. Prosedur pengumpulan data

Jenis Pengumpulan data, Penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

#### 1). Studi Kepustakaan

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, h. 80.

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 108.

<sup>15</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Sampel\\_\(statistika\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Sampel_(statistika)), Diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 Pukul 13.45.

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mengintevigasi dan mempelajari tinjauan hukum Islam terhadap jual emas tanpa surat tersebut. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

## 2). Studi Lapangan

Studi lapangan dengan cara memperoleh data yang bersifat primer. Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi objek penelitian dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang terdapat di lingkungan, baik yang sedang berlangsung saat itu atau masih berjalan yang meliputi berbagai aktifitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan penginderaan. Peneliti juga akan melakukan tatap muka dengan narasumber untuk mengajukan suatu pertanyaan melalui wawancara terstruktur dengan pihak terkait dalam hal ini adalah pemilik ataupun karyawan toko emas di pasar Kota Agung, serta pembeli yang menjual emas tanpa surat.



#### b. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pemilik toko atau karyawan toko emas pasar Kota Agung Tanggamus.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar. Menganalisis data sesuai dengan praktek jual beli yang terjadi dalam masyarakat. dalam penelitian ini metode pengumpulan data dengan cara mengambil gambar lokasi penelitian, dan melakukan rekaman pada saat melakukan wawancara.

#### d. Prosedur Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat

yang jelas, teratur, logis, dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

e. Pemeriksaan keabsahan data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian.

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

## 2. Triangulasi

William Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. dalam penelitian ini penulis menggunakan metode triangulasi memeriksa keabsahan data.<sup>16</sup>

## 3. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto- foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*.....h. 275.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 274.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 1. Jual Beli Dalam Hukum Islam

##### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa yaitu mengganti, menjual atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>18</sup>

Menurut Jalaluddin al-Mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah:

مُقَا بِلُون شَيْءٍ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الْمُعَاوَضَةِ

Artinya: Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan”.<sup>19</sup>

Sementara itu jual beli menurut istilah adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا وَتَمْلِيكًا

Artinya: Menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan”.<sup>20</sup>

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Lafal *al-bai'* dalam arti terminologi fiqh terkadang dipakai untuk

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 67.

<sup>19</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), h. 63.

<sup>20</sup> *Ibid.*,

pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, bahwa jual beli atau (*al-bai'*), yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Syari'ah *bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>21</sup>

Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*) atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dengan prinsip tidak melanggar syariah. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan barang.<sup>22</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang

---

<sup>21</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012), h. 46.

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali, 2017), h. 167.



lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (Hukum Islam).<sup>23</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum dasar dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (790 H), pakar fikih Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik.<sup>24</sup>

Jual beli memiliki dasar hukum yang kuat baik Al-qur'an hadits dan ijma para ulama.

### 1. Al-Quran

Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Dalam bahasa Arab yang di *nukilkan* kepada generasi sesudahnya secara *mutawatir*, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam *mushaf*, dimulai dari surat *Al-Fatihah* dan ditutup dengan surat *An-Nash*. Imam As-Syafi'i sebagaimana para ulama lainnya menetapkan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 139.

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *fikih muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 50.

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 50.

Dalam Al-Quran banyak membahas tentang jual beli ayat-ayat tersebut antara lain Al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُمَوِّمُونَ إِلَّا كَمَا يُمُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29).

## 2. As-Sunnah

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنْابُورٌ بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنْابُورٌ بِمِثْلٍ)

فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَاً

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas yang sama timbangannya dan

sama sebanding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama sebanding. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka itu riba." (H.R Muslim).<sup>26</sup>

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ وَعَمَّانُ قَالَ تَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ لَا رِبَا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ قَالَ يَعْنِي إِتْمَالَ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ishaq dan 'Affan keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bukanlah termasuk riba jual beli secara kontan, hanyasanya riba itu bisa terjadi dalam jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan (H.R Ahmad).<sup>27</sup>

### 3. *Ijma'*

*Ijma'* merupakan suatu kesepakatan seluruh ulama mujtahidin di antara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw.

Atau hukum *syar'i* mengenai suatu kejadian atau kasus, tentang diperbolehkannya melakukan jual beli.<sup>28</sup>

Berdasarkan *nash* di atas ulama Mujtahidin telah ber *ijma'* tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang tergantung di dalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lainnya. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu pun tanpa ada ganti atau imbalannya. Oleh karena itu, jual beli dalam

<sup>26</sup> H.R Muslim, Sumber Shahih Muslim, No. 1587.

<sup>27</sup> H.R Ahmad, *Hadits Usman bin Zaid Kecintaan Rasulullah Shalallallahu 'alaihi wasallam*, Kitab Musnad Sahabat Anshar, No. 20748.

<sup>28</sup> Saleh Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 365.

rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia diperbolehkan.<sup>29</sup>

Berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan *Ijma'*. Jual beli diperbolehkan (dihalalkan oleh Allah Swt) asalkan didasarkan suka sama suka dan tidak melanggar apa yang telah ditetapkan didalam hukum Islam mengenai jual beli.

Hukum jual beli dapat menjadi haram, mubah, sunnah dan wajib atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang diharamkan oleh syara' seperti menjual benda najis.
- b. Hukum jual beli menjadi mubah, apabila melakukan transaksi ketika sudah selesai.
- c. Hukum jual beli menjadi sunnah, apabila seseorang bersumpah menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan hal demikian itu sunnah.
- d. Hukum jual beli menjadi wajib, pada saat *dorurat* atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.<sup>30</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### 1. Rukun Jual Beli

<sup>29</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, h. 65.

<sup>30</sup> Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh Ala Madzahi Bil Arba'ah, Az-Zariyah*, (Kairo Mesir: cet. VI, Juz II, tt), h. 141.

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun-rukun jual beli yaitu:

a). Pihak-pihak yang berakad

pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.<sup>31</sup>

b). Objek akad

Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.<sup>32</sup>

c). Tujuan Pokok akad

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak mengadakan akad.<sup>33</sup>

d). Kesepakatan

Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan dan ataupun perbuatan.<sup>34</sup> Menurut jumhur ulama rukun jual beli meliputi:

- 1). *Bai* (penjual)
- 2). *Mustari* (Pembeli)
- 3). *Sighat* (ijab dan qabul)
- 4). *Mauqudalaih* (benda atau barang).<sup>35</sup>

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *FiqhMuamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 75.

<sup>32</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 22.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 23.

<sup>34</sup> *Ibid.*,



Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam melakukan transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun-rukun jual beli tersebut.

## 2. Syarat Jual Beli

Suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli agar menjadi sah, haruslah memenuhi syarat yaitu:

### a). Dua orang yang berakad

1. *Mumayyiz*, balig dan berakal. Maka tidak sah akad nya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akad nya anak kecil.
2. Tidak terlarang membelanjakan harta, baik itu terlarang hak dirinya atau yang lainnya.
3. Tidak dalam keadaan terpaksa dalam melakukan akad.

Karena adanya kerelakan bagi kedua belah pihak.<sup>36</sup>

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat.

1. Berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakuan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukum nya tidak sah.
2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda . artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,.....h. 76.

<sup>36</sup> Eneng Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h. 18.

<sup>37</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 116.

Syarat khusus jual beli menurut kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah yaitu:

1. Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli di pandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak.
2. Apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.<sup>38</sup>

b). Objek Jual Beli

Objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Bersih barangnya
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Mampu menyerahkan
5. Mengetahui
6. Barang yang diakadkan ada ditangan.<sup>39</sup>

c). *IjabQabul*

1. Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal.
2. *Qabul* sesuai dengan *ijab*.

<sup>38</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi *Hukum Ekonomi Syari'ah*,.....h. 32.

<sup>39</sup> Suharwardi K Lubis, Farid Wajdi, *Huku Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 146.

3. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis.

d). Alat tukar

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat ats-tsaman (harga pasar yang berlaku ditengan-tengah masyarakat secara aktual), sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.<sup>40</sup>

Apabila semua syarat jual beli di atas telah terpenuhi, maka barulah secara hukum transaksi jual beli tersebut dianggap sah dan mengikat, dan oleh sebab itu, pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli tersebut.

#### **D. Jual Beli yang dilarang**

Rasulullah SAW. Melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan yang dapat mengakibatkan adanya penyesalan pihak yang ikut transaksi jual beli. Selain itu dengan adanya jual beli dapat mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan, dan permusuhan sebagai transaksi jual beli.<sup>41</sup> Perbedaan pendapat terhadap kebolehan memerjualbelikan sebagai najis berawal dari perbedaan mereka dalam

<sup>40</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,....h. 35.

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 146.

menetapkan ilat diharamkan memperjualbelikan najis tersebut, yakni apakah karna benda itu najis atau karna benda itu tidak dianggap sebagai harta dalam Islam.

Ulama madzhab Syafi'i, madzhab Maliki, mazhab Hambali (Jumhur Ulama) berpendirian bahwa ilat keharaman memperjualbelikan benda-benda najis itu adalah karena kenajisannya haram diperjualbelikan. Seperti darah, bangkai, babi, dan anjing. Akan tetapi dikalangan sebagian ulama Madzhab Maliki ada pendapat yang mengatakan bahwa anjing boleh diperjualbelikan karena anjing bagi mereka bukan najis.<sup>42</sup>

1. Barang yang dihukumi najis oleh Agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamr.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan, jual beli hewan ini diharamkan.
3. Jual beli binatang yang masih dalam perut induknya jual beli ini dilarang karena barangnya belum ada.
4. Jual beli tanaman yang masih di ladang atau disawah, jual beli dengan menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen.  
dia menyebutkan hadits yang sama.
5. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan

---

<sup>42</sup> Djamila Usup, *Hukum Jual Beli dengan Barang-Barang Terlarang*, h.....4-6.

tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

6. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
7. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi baah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
8. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan.
9. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga.
10. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang.
11. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yg dikecualikan salah satu bagian nya. Jual beli ini sah jika pengecualian nya jelas.

Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal.

12. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.<sup>43</sup>

#### D. Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain linguistik riba juga berarti “tumbuh” dan “membesar”.<sup>44</sup> Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan “tambahan” dari harta pokok atau modal secara batil.<sup>45</sup> Maksud dari “tambahan” di sini, yaitu tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas, tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena tertunda pembayarannya, seperti bunga hutang, dan tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya serah terima langsung. Misalkan Penjualan rupiah dengan dolar, harus ada serah terima secara langsung, apabila ditunda serah terima tersebut maka ada unsur riba.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...* h. 87.

<sup>44</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah, Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 60.

<sup>45</sup> Masfuk Zuhdi, *MasailFiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1994), h. 102. Bandingkan dengan Muhammad Syafi’I Antonio, *BankSyari’ah: WacanaUlamadanCendikiawan*, (Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute), h. 59.

<sup>46</sup> Abdullah Al-muslih Shalah Al-shawi, *Bunga Bank Haram, Menyikapi Fatwa MUI Menuntaskan Kegamangan Umat*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), h. 1-2.



Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan riba sebagai “tambahan (*ziyâdah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba *nasî’ah*”. Para modernis dan pakar ekonomi mendefinisikan riba sebagai “suatu kelebihan” atau “kelebihan yang sangat besar jumlahnya”. Beberapa ulama sepakat bahwa jenis yang kedualah yang bisa menimbulkan terjadinya “riba”. Para ulama mengatakan, bahwa setiap penambahan pada uang pinjaman yang saat dikembalikan oleh peminjam menyebabkan terjadinya riba, maka hal tersebut dilarang.<sup>47</sup>

Beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum ditegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Ibn al-‘Arabi al-Maliki dalam kitabnya *Ahkam Al-Quran*, sebagaimana dikutip Syafi’i Antonio, menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah tambahan (*ziyadah*), namun yang dimaksud riba dalam ayat Qurani yaitu “setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah”. Maksud dari transaksi pengganti atau penyeimbang, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual-beli, gadai, atau bagi hasil

---

<sup>47</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Bunga (Intersat/Faidah).

proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomi suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai maka nilai ekonomisnya pasti menurun jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapatkan keuntungan karena di samping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisasa saja muncul setiap saat.<sup>48</sup>

*Riba* dalam Al-Quran terulang sebanyak delapan kali terdapat dalam empat surah, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan Al-Rum. Tiga di antaranya adalah termasuk kelompok surat Madaniyyah, sedangkan surah Al-Rum tergolong surat Makkiyyah. Ini berarti bahwa surah Al-Rûm adalah surah pertama yang turun dan membicarakan tentang *riba*. Pembicaraan Al-Quran tentang *riba* sama dengan tahapan pembicaraan tentang *khamr*. Pada tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya (Al-Rum[30]:39), kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya (An-Nisa [4]:161), selanjutnya pada tahap ketiga, secara eksplisit dinyatakan keharaman salah satu bentuknya (Ali- Imran [3]: 130), dan

---

<sup>48</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dan Teori Praktik*, (Jakarta: Gema Insani press, 2001), h. 38.

pada tahap terakhir, diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (Al-Baqarah [2]: 278-279).

Dalam pembagian bentuk-bentuk riba terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang membagi riba ke dalam dua bentuk, yaitu riba *fadl* dan riba *nasi'ah*. Sebagian membaginya ke dalam tiga bentuk, yaitu riba *fadl*, riba *nasi'ah* dan riba *jahiliyyah*, atau riba *fadl*, riba *nasi'ah*, dan riba *yad*. Sebagian lain membaginya ke dalam empat bentuk, yaitu riba *fadl*, riba *nasi'ah*, riba *yad*, dan riba *qard*.<sup>49</sup> Perbedaan pembagian bentuk-bentuk riba tersebut dapat dimaklumi. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari cara penafsiran dan kajian yang berbeda yang dilakukan oleh para ulama fikih terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Hadist tentang riba. Jika merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan Hadist maka riba terbagi menjadi dua, yaitu:

#### 1. Riba *Fadl*

Riba *Fadl* disebut juga riba *buyu'*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan biyadin*). Pertukaran semisal ini mengandung *gharar*, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Riba *al-Fadhl*, jenis riba yang melebihkan salah satu dari dua barang yang diperjual belikan (dibarter)

<sup>49</sup> Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 1.

pengharamannya masuk dalam kategori menutup jalan (*sadal-zari'ah*) yang menuju ke riba *al-Nasi'ah*.<sup>50</sup>

## 2. Riba *Nasi'ah*

Istilah *nasi'ah* berasal dari kata *An-nisa'* yang berarti menunda menanggihkan, atau menunggu, dan mengacu pada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali hutang dengan memberikan “tambahan” atau “premi”. Karena itu, riba *nasi'ah* mengacu kepada bunga dalam utang. Dalam arti inilah, istilah riba dipergunakan dalam Q.s al-Baqarah [2]:275 “...*dan Allah mengharamkan riba*”. Arti ini juga yang ditunjukkan oleh sabda Rasulullah Saw. ketika beliau mengatakan, “*Tidak ada riba kecuali nasi'ah*”.<sup>51</sup> Riba *Nasi'ah* disebut juga *ba'i duyun*, yaitu riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria “untung muncul bersama risiko” (*al-ghunmu bil ghunmi*) dan “hasil usaha muncul bersama biaya” (*al-kharajbi dhaman*).

Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, karena hanya berjalannya waktu. *Nasi'ah* adalah penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribawi* yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribawil* lainnya. Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang

<sup>50</sup> Ibn Qayyim dan Ibnu Taimiyyah, *Islam dalam Tinjauan Akal dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 285.

<sup>51</sup> Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 22.

yang diserahkan kemudian.<sup>52</sup> Jenis riba ini yang bisa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, seperti seseorang yang memberi tenggang pembayaran utang akan tetapi ia menambah hutang tersebut dan setiap kali mengakhirkan pembayaran maka bertambah pulalah yang akan dibayar sehingga hutang yang hanya bernilai seratus bisa jadi mencapai ribuan.

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang status hukum riba dan bunga. Pertama, praktik pembunga-an uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw. yaitu riba *nasî'ah*. Dengan demikian, praktik pembunga-an uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya” Kedua, praktik penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.<sup>53</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, pembahasan riba yang diharamkan Al-Quran dapat dikaji dengan menganalisis lebih khusus lagi kata-kata kunci dari ayat-ayat landasan hukum riba yang disebutkan di atas, yaitu:

- a. *adh'âfan mudhâ'afan* (Q.s. Ali Imrân[3]: 130)
- b. *mâ baqiya min al-ribâ* (Q.s.al-Baqarah [2]: 278);

---

<sup>52</sup> Muhammad Taqi Utsmani, *The text of Historical Judgement on Riba*, (Kuala Lumpur: The Other Press, 2001), h. 34.

<sup>53</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), No. 1 Tahun 2004, Tentang Bunga (Intersat/Faidah).

c. *fa lakum ru'ûsuamwâlikum* (Q.s. al-Baqarah [2]: 279); dan

d. *lâ tazlimûna wa lâ tuzhlamûn* (Q.s. alBaqarah[2]:279).<sup>54</sup>

Kata *adh'âfan mudhâ'afan* berarti “berlipat ganda”. Lalu timbul pertanyaan, apakah yang diharamkan itu hanya penambahan yang berlipat ganda ataukah segala bentuk penambahan dalam kondisi tertentu? Bagi mereka yang berpegang pada teks tersebut menyatakan bahwa ini merupakan syarat keharaman. Artinya bila tidak berlipat ganda maka tidak haram. Sedangkan pihak lain menyatakan bahwa teks tersebut bukan merupakan syarat tetapi penjelasan tentang bentuk riba pada masa jahiliyah, sehingga sekalipun tidak berlipat ganda tetap hukumnya haram.

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa jawabannya ada pada kata kunci berikutnya, yaitu *falakum ru'ûsu amwâlikum* (bagimu modal-modal kamu) (Q.s. al-Baqarah [2]:279).

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Seperti yang diuraikan dalam Al-Quran di atas bahwa riba hukumnya haram., yang berhak mereka peroleh hanyalah modal-modal mereka. Artinya setiap penambahan ataupun kelebihan dari

<sup>54</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jil.I, h. 725727. Lihat juga. M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 261.

modal mereka tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian kata kunci ini menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak, telah diharamkan Al-Quran dengan turunnya ayat tersebut. Ini berarti bahwa kata *adh'afan mudha'afan* bukan merupakan syarat tetapi sekedar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktikkan.

Dengan demikian yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan. Namun perlu untuk digaris bawahi bahwa kelebihan yang dimaksud adalah dalam kondisi yang sama, seperti yang terjadi pada masa turunnya Al-Quran dan yang diisyaratkan oleh penutup ayat 279 surat al-Baqarah tersebut, yaitu *latazlimuna wa la tuzhlamun* (kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya).<sup>55</sup>

Di kalangan para ahli fikih, ada perbedaan pendapat dalam memandang 'illat hukum riba dan bunga bank, sebagian mengatakan 'illat riba dan bunga bank itu sama, yaitu adanya tambahan atau bunga tanpa disertai imbalan. Pandangan ini dianut oleh ahli fikih Islam kontemporer, yaitu Abu Zahrah, Wahbah al-Zuhaili, Yusuf al-Qaradhawi (ahli fikih Timur Tengah), Abdul Mannan, Syafi'i Antonio, Adiwarmanto A. Karim (ahli hukum Islam dan praktisi perbankan Syariah Indonesia).

---

<sup>55</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*.....h. 266.



Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa pengharaman riba dalam Al-Quran tidak membutuhkan penjelasan, tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu kepada manusia yang tidak mereka ketahui bentuknya. Segala kelebihan dari modal adalah riba, sedikit maupun banyak. Setiap tambahan dari modal yang disyaratkan atau ditentukan di awal, semata dikarenakan adanya unsur tenggang waktu adalah riba. Pemahaman riba ini sesuai dengan Q.s. al-Baqarah [2]:278-279.<sup>56</sup> Wahbah al-Zuhayli sebagaimana dikutip dalam Mas'adi, mengkategorikan bunga bank sebagai riba *nasī'ah*, karena kelebihan atau tambahan yang dipungut tidak disertai imbalan, melainkan karena semata-mata penundaan tenggang waktu pembayaran.<sup>57</sup>

#### **E. Gharar**

Kata *gharar* berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. *Gharar* dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi risiko. Tentu saja risiko yang sifatnya

<sup>56</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram: Dirasat al-Fiqhiyyah fi Dhau' Al-Qur'an wa al-Sunnah wa al-Waqi'*, (Bayrut: Muassasat al-Risalah, 1993), h. 44-45.

<sup>57</sup> Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 166.

komersil disetujui dan didukung dalam Islam. Setiap jenis kontrak yang bersifat *open-ended* mengandung unsur *gharar*.<sup>58</sup>

Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Al-Quran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain: hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya. Dalam Q.s.al-An'am[6]:152 dijelaskan sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ  
بِالْقِسْطِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ  
أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepada mu agar kamu ingat. (Q.s al-An'am [6]:152).

*Gharar* hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada

<sup>58</sup> Ibrahim Warde, *Islamic Finance In The Global Economy*,.....h. 59.

unsur *ghararnya* hukumnya tidak boleh. Bisnis yang sifatnya *gharar* tersebut merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya, kondisi barang, waktu memperolehnya. Dengan demikian antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut. Sedangkan dalam konsep fikih yang termasuk ke dalam jenis *gharar* adalah membeli ikan dalam kolam, membeli buah-buahan yang masih mentah dipohon, praktik *gharar* ini tidak dibenarkan salah satunya dengan tujuan menutup pintu lagi munculnya perselisihan dan perbuatan kedua belah pihak. Lebih jelasnya, *gharar* merupakan situasi dimana terjadi *uncomplete information* karena adanya ketidak pastian kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam *gharar* ini, kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. *Gharar* bisa terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.

Sebagaimana *riba*, *gharar* juga mendapat larangan tegas meskipun sedikit banyak samar-samar. Dalam fikih *gharar* dimaklumi apabila dalam keadaan butuh (*hajat*) yang tidak bisa dialihkan kecuali dengan kesulitan besar (*dharurah*). Banyak Hadist yang menyatakan tentang konsep transaksi komersial yang penuh dengan ketidak pastian. Atas dasar banyaknya Hadist yang melarang tentang *gharar* tersebut, Vogel secara terang-terangan telah melarang *gharar* dalam spektrum

menurut derajat tingkat risiko, meliputi: spekulasi murni, hasil tidak pasti, masa depan manfaat tidak tahu, dan ketidak tepatan. Ia menyimpulkan bahwa, *gharar* muncul disebabkan, 1). Oleh karena ketiadaan pengetahuan (*jahl*: ketidaktahuan), 2). Sebab obyek sekarang tidak ada, 3). Sebab obyek tidak pada kekuasaan penjual.<sup>59</sup> Kalau dilihat dari hukum keharaman dan kehalalannya, jual beli yang sifatnya *gharar* terbagi menjadi tiga:

1. Bila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang berdasarkan *ijma'*. Seperti menjual ikan yang masih dalam air dan burung yang masih di udara.
2. Bila jumlahnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut *ijma'*. Seperti pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah).
3. Bila kuantitasnya sedang-sedang saja, hukumnya masih diperdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitas, dikembalikan kepada kebiasaan.

Menurut para ulama jenis dan tingkatan *gharar* itu berbeda-beda. Pertama, *gharar* berat. Batasan *gharar* berat yaitu “*huwama kana ghaliyan fi al-‘aqdi hatta shara al‘aqduyusofubih*” *gharar* [berat] itu adalah *gharar* yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut). Contoh *gharar* berat ini, yaitu menjual buah buahan yang belum tumbuh, menyewakan (*ijarah*) suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang (akad salam) untuk barang yang tidak

---

<sup>59</sup> Ibrahim Warde, *Islamic Finance In The Global Economy*....h. 60.

pasti ada pada waktu penyerahan. *Gharar* jenis ini hukumnya haram, karena dapat menimbulkan perselisihan antar pelaku bisnis dan akad yang disepakati tidak sah.

Kedua, *gharar* ringan, yaitu *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut '*urf tujjâr*' (tradisi pebisnis) sehingga pihak-pihak yang bertransaksi tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat fondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. *Gharar* jenis ini dibolehkan dan akad yang disepakati tetap sah.<sup>60</sup>

Secara etika pelarangan riba dikarenakan tidak etis melakukan transaksi yang mengeksploitasi pihak lain. Secara ekonomi ini tentunya akan merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Riba ini dilarang bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang bertransaksi dalam ekonomi yang dirugikan dan agar uang tidak menjadi komoditas tetapi sebagai alat tukar yang menghasilkan barang. Hal yang sama dengan *gharar*. Secara etika pelarangan *gharar* dikarenakan tidak etis melakukan transaksi yang belum jelas dan mengandung ketidak pastian kedua belak pihak. Secara ekonomi ini tentunya akan merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. *Gharar* ini dilarang bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang

---

<sup>60</sup> Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi*,....h. 82-83.

bertransaksi dalam ekonomi yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara yang bertransaksi.<sup>61</sup>

Harus kita cermati bahwa, mengapa Islam melarang *riba* dan *gharar*. Sebab *ribadan gharar* merupakan suatu sikap yang menyalahi nilai-nilai yang telah ada dalam Islam itu sendiri, baik itu dari segi etika, moral dan akhlak. Secara umum nilai-nilai (etika) Islam dirangkum dalam empat prinsip pokok:

1. Tauhid. Prinsip ini mengantarkan manusia mengakui bahwa keesaan Allah mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber serta kesudahannya berakhir kepada Allah. Prinsip ini menghasilkan “kesatuan-kesatuan” yang beredar dalam orbit tauhid. Kesatuan itu antara lain, kesatuan kemanusiaan, kesatuan alam raya, kesatuan dunia dan akhirat.
2. Keseimbangan. Prinsip ini mengantarkan manusia Muslim meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. (Q.s. al-Mulk [67]:3). Prinsip ini menuntun prinsip-prinsip yang lainnya.
3. Kehendak bebas. Merupakan prinsip yang mengantarkan seorang Muslim meyakini bahwa Allah memiliki kebebasan mutlak, namun juga Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk

---

<sup>61</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rarawali Pers, 2015),h. 94.

memilih jalannya sendiri, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Inilah kemudian, dasar lahirnya prinsip tanggung jawab.

4. Tanggung jawab. Manusia sebagai individu dan kolektivitas mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan nasibnya sendiri, tapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.<sup>62</sup>

Dengan menjadikan wahyu sebagai pengetahuan tertinggi tentang kriteria yang baik dan yang buruk, maka ajaran Islam tentang etika dan moral bersifat mutlak, yang menganggap *riba* dan *gharar* merupakan suatu bentuk yang menyalahi kaidah moral dan etika Islam. Selain bersifat mutlak tersebut etika Islam juga sifatnya permanen, eternal dan universal. Ia tidak tunduk terhadap ruang dan waktu tapi mengatasi ruang dan waktu. Nilai-nilai moral dalam Islam berlaku untuk semua orang dan semua tempat tanpa memandang latar belakang etnis kesukuan, kebangsaan, dan keadaan sosio kultural serta lingkungan geografis mereka. Dalam Islam hanya terdapat kodemoral untuk semua orang.

#### **F. Pandangan Hukum Islam Terhadap Emas**

Emas merupakan tambang elok, Allah sarati padanya banyak manfaat yang tak terdapat pada aneka tambang lain. Lantaran kelangkaan dan keindahannya, bangsa manusia telah menjadikannya uang dan nilai tukar bagi segala sesuatu sejak kurun-kurun lalu. Dari

---

<sup>62</sup> M Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 1998), h. 409-410.



sisi ini, Syariat memandang emas dengan pandangan tersendiri, dan mengibaratkannya sebagai suatu kekayaan alam yang hidup.<sup>63</sup>

Emas sudah dipakai pada zaman Nabi Musa dan Qarun, harta karun secara bahasa artinya harta yang banyak berlimpah dan ditemukan didasar laut atau didalam gua didalam tanah. Bukan diperoleh dari hasil kerja berat. Sebenarnya istilah harta karun berhubungan dengan seorang kaya raya dari Bani Israel yang namanya Qarun. Dia hidup dizaman Nabi Musa AS. Pada mulanya Qarun hanyalah seorang pemuda miskin yang taat beribadah. Kagum melihat ketekunannya beribadah dan iba melihat kemiskinannya, Nabi Musa memberi Qarun ilmu Kimia sehingga ia memiliki keahlian mengolah emas. Dengan keahliannya itulah Qarun yang miskin berwirausaha sehingga menjadi seorang yang kaya raya. Kekayaan rupanya mengubah perilaku Qarun. Dia tidak bersyukur, tetapi imannya malah luntur dan lama-lama menjadi kufur.<sup>64</sup>

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

<sup>63</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 242.

<sup>64</sup> Yimi Diantoro, *Emas Investasi dan Pengolahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 1.

Artinya: “Janganlah kalian minum dari bejana emas dan perak dan janganpula kalian makan dari piring-piring emas dan perak.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>65</sup>

Dalam hadits dari Ummu Salamah *radhiallahu ‘anha*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda.

الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجْرِحُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

Artinya: “Orang yang minum dari bejana perak, maka sesungguhnya dia telah memasukkan api neraka ke dalam perutnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>66</sup>

Hadits di atas menjelaskan bahwa larangan menggunakan bejana dari emas dan perak sebagai piring sendok gelas dan lain sebagainya yang digunakan untuk makan dan minum, dihukumi haram meskipun makanan yang dimakan halal. Dalam hadits dijelaskan pula orang yang minum dari bejana perak maka sesungguhnya dia telah memasukkan api neraka kedalam perutnya, sudah jelas bahwa jika menggunakan bejana emas maupun perak dihukumi haram dan dosa besar. Lalu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan emas sebagai perhiasan.

Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani' dalam *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islamiy* status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai tsaman (alat tukar, uang) dan bahwa nash sudah jelas menganggap

<sup>65</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemahan Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 78.

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 120.

keduanya sebagai harta *ribawi*, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai *tsaman* (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penangguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya.<sup>67</sup>

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman Hadist-Hadist tentang riba, yang antara lain menegaskan: "Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai. Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba. Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).<sup>68</sup>

Perdagangan emas memiliki sejarah panjang. Ditemukan pada zaman kuno, emas telah menjadi tanda posisi kekayaan dan sosial dibanyak

---

<sup>67</sup> Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani' dalam *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islamiy*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1996), h. 322.

<sup>68</sup> Fatwa DSN, Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

masyarakat sejak pertama kali digunakan sebagai mata uang. Emas saat ini masih merupakan bahan penting perdagangan dan bisnis. Negara menilai emas sebagai ukuran kekayaan dan basis pertukaran. Individu nilai emas sebagai asuransi karena uang kertas tidak selalu pasti. Emas memiliki efek pada pasar keuangan dunia hari ini dan akan ke masa depan.<sup>69</sup>

Sebelum lahirnya uang, emas sudah ada sejak lama dijadikan sebagai barang pembanding dan nilai tukar untuk berbagai keperluan manusia. Sifatnya yang tahan karat, tidak mudah terurai, dan langka menjadikan bahan tambang yang satu ini dikenal sebagai barang tambang istimewa. Bersama dengan perak dan platina, emas dikenal sebagai golongan logam mulia. Bahkan meskipun bersama dengan perak dan platina, emas tetap yang diutamakan. Dalam perkembangan ekonomi modern, pada mulanya banyak bank sentral Negara-negara menjamin nilai tukar mata uangnya dengan emas. Berjalan dengan waktu dan terbentuknya peradaban modern, bank sentral berangsur angsur tidak lagi menjamin uang kertas yang mereka keluarkan dengan emas dan menjadikan emas justru salah satu komoditas pandangan seperti layaknya barang-barang lain diluar sana. Ini dikarenakan kepercayaan publik telah jauh lebih baik terhadap pemerintahnya. Bank Indonesia juga pernah menjamin rupiah yang mereka terbitkan dengan emas pada awal-awal kemerdekaan Indonesia.<sup>70</sup> Emas bukan hanya untuk perhiasan saja, namun emas menjadi salah satu yang sangat diminati sebagai alat untuk investasi, lalu mengapa emas atau gold

---

<sup>69</sup> Frento T Suharto, *Harga Emas Naik Atau Turun Kita Tetap Untung*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), h. 51.

<sup>70</sup> *Ibid*, h. 31.

yang paling diminati untuk investasi oleh banyak orang?, emas dikenal sebagai alat investasi yang selalu menguntungkan. Orang membeli emas untuk melindungi nilai mata uangnya yang terkena resiko inflasi.<sup>71</sup>

Dalam *fiqh muamalah* prinsipnya adalah segala sesuatu hukumnya boleh dan halal kecuali jika ada dalil yang secara eksplisit melarangnya, ini merupakan kebalikan dari prinsip hukum dalam fikih ibadah, dimana suatu ritual ibadah dianggap batal sampai ada dalil yang melegitimasi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziah:

“Hukum asal dalam ibadah adalah batal sehingga ada dalil yang memerintahkannya, sedangkan hukum asal dalam akad dan muamalat adalah sah sehingga ada dalil yang menunjukkan akad itu batal dan haram.”<sup>72</sup>

Ketika dihadapkan pada satu kasus muamalah kontemporer yang tidak ada petunjuk langsung baik dari Al-Qur'an, sunnah maupun ijtihad ulama terdahulu, kita harus memandang kasus tersebut dengan praduga halal dan boleh selama tidak ditemukan adanya indikasi unsur-unsur haram yang ada dalam transaksi tersebut. Pertanyaan pertama yang dilontarkan bukan “adakah dalil yang memperbolehkan” sehingga kalau jawabannya tidak ada, maka kembali kepada hukum asalnya yaitu boleh. Fikih muamalah selalu memiliki alasan rasional yang melibatkan pertimbangan maslahat dan mudarat bagi kehidupan manusia dibalik setiap hukumnya. Berbeda

---

<sup>71</sup> Frento T Suharto, *Menambang Kekayaan dari Bisnis Emas Tanpa Mengeruk Alam*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014), h. 6.

<sup>72</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1991), cet.1, jilid, 1, h. 259.

dengan ibadah dimana tata cara ritual ibadah tertentu tidak bisa dijangkau oleh nalar manusia.

Dalam Fikih muamalah transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam, di balik setiap larangannya ada illat atau alasan hukum yang bisa ditakar dengan nalar manusia baik karna ada kemaslahatan yang ingin dicapai atau kemudharatan yang ingin dihindari. Seperti keharaman riba untuk menghindari adanya tindakan eksploitasi dari kreditur terhadap debitur, atau keharaman *maisir* (judi) untuk menghindari kemalasan kerja, keharaman *gharar* untuk merealisasikan prinsip saling rida, (*'antaradhin*) dalam jual beli dan menghindari unsur ketidak pastian (*game of chance*) sehingga ada pihak yang merasa dirugikan dan lain sebagainya.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah juga menandakan bahwa penerapan hukum yang tidak dilandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, rahmat, dan hikmah maka sesungguhnya telah terjadi pemerkosaan takwil. Apa yang diterapkannya bukanlah substansi syariat tetapi dipaksakan diterapkan karena kedangkalan ilmu yang mereka miliki. Untuk itu dalam mengkaji kasus-kasus kontemporer terkait dengan tema muamalah kita tidak bisa lepas dari pertimbangan *maqashidus syari'ah* sebagai substansi dari penetapan hukum. Panduan Nabi berkaitan dengan pertimbangan maslahat dalam muamalah salah satunya adalah ketika Nabi membolehkan jual beli salam yaitu menjual belikan barang di mana ketika transaksi dilakukan, barangnya belum ada, hanya terjadi pembayaran dan penyebutan spesifikasi barang yang akan diserahkan dalam jangka waktu yang

disepakati. Hal ini pada dasarnya dilarang, sebab nabi pernah melarang jual beli barang yang belum dimiliki atau belum ada. Tetapi karena praktik itu sudah menjadi tradisi di Madinah dimana orang-orang mendapatkan kemudahan dengan transaksi itu, Nabi pun memperbolehkan dengan syarat spesifikasi barang dan waktu sudah jelas.<sup>73</sup>

## **B. Tinjauan Pustaka**

1. Skripsi yang ditulis oleh Era Wahyuni, dengan judul “Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas Dalam Perspektif Hukum Islam” kesimpulan pada skripsi ini adalah dalam praktik penambahan dan pengurangan pada nilai harga jual beli emas belum sejalan dengan hukum Islam. Karena dalam praktik tersebut hampir tidak terdapat transparansi antara penjual dan pembeli pada penetapan ongkos pembuatan emas, sehingga dalam transaksi tersebut pembeli tidak dapat memenuhi haknya untuk mendapatkan harga yang diinginkannya dalam transaksi jual beli emas, dalam Islam mekanisme pasar dibangun atas kebebasan individu sesuai dengan yang disukai kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak manapun. Dalam metode penelitian yang ditulis oleh Era Wahyuni disini lebih menekankan apakah ada unsur *gharar* atau tidak karena dalam jual beli haruslah jujur tanpa ada paksaan atau penipuan dalam jual beli tersebut. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

---

<sup>73</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Selatan: 2018), h. 19-20.



Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah, dari segi objek yang dibahas yaitu emas, membahas mengenai potongan harga, metode penelitian yang digunakan sama, yaitu (*field research*) penelitian lapangan, Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada, sehingga lebih mudah untuk dipahami, kemudian dianalisis lalu disimpulkan.

Perbedaannya adalah pada lokasi penelitian, skripsi yang ditulis oleh Era Wahyuni di Pasar Aceh provinsi Aceh, skripsi yang ditulis oleh penulis lokasi penelitiannya di Pasar Kota Agung Tanggamus provinsi Lampung, Topik permasalahan yang dibahas, pada skripsi Era Wahyuni bukan hanya membahas mengenai pengurangan namun juga menambahkan harga emas, yang dilakukan oleh sepihak.

2. Skripsi yang ditulis oleh Aida Rachman dengan judul, Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer. Membahas tentang bagaimana jual beli emas secara kredit menurut hukum Islam. Jual beli emas secara kredit menurut perspektif hukum Islam terdapat 2 pendapat. Kesimpulan pada skripsi ini adalah dilarang: pendapat ini didukung oleh pendapat mayoritas fuqaha, dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali serta pendapat As-Syaikh Nashirudin Al-Bani. Dan boleh: pendapat ini didukung oleh pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang, berpendapat bahwa emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal ini menyebabkan riba. Sedangkan ulama yang membolehkan, berpendapat bahwa jual beli emas boleh dilakukan baik secara tunai maupun kredit asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai *tsaman* (harga) melainkan *sil'ah* (barang).

Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti adalah, objek penelitiannya adalah emas.

Perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti adalah, lokasi penelitian, topik permasalahan yang dibahas, dalam skripsi yang ditulis Aida Rachman, membahas mengenai ketidak bolehan jual beli secara kredit, skripsi yang ditulis oleh penulis membahas potongan harga jual emas karena tidak adanya surat.

## DAFAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Antoni, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- ....., *Bank Syariah dan Teori Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Chapra, Umar, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: PT SigmaExamedia Arkanlema, 2009.
- Diantoro, Yimi, *Emas Investasi dan Pengolahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
- Fatwa Majelis Ulama (MUI), Nomor 1, Tahun 2004, Tentang Bunga (Intersat/Faidah).
- Fauzan, Saleh, *Fikih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Hajar Ibnu Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemahan Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h.326.
- Haroen, Nasrun, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Muhammad Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat Eneng, *Fiqh jual beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015.
- Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim, *Islam dalam Tinjauan Akal dan Hikmah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Al-Imann Abdul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, Terjemah Tafsir Ibnu Katsir, Juz 1, Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'alamin*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1991.

- Al-Jaziri, Rahman Abdul, *Kitabul Fiqh Ala Madzahi Bil Arba'ah Azzariyah*, kairo Mesir, Cet VI, Juz II.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT fajar Interpratama Mandiri, 2012.
- ....., *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali, 2017.
- Mas'adi, Gufron A, *FiqhMuamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Oni Sahroni, Adiwarman A Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah. Analisi Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- ....., *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Qardhawi, Yusuf, *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram: Dirasat Al-Fiqhiyyah fi Dhau' AlQuran 'an wa al-Sunnah wa al- Waqi'*, Bayrut: Muassasat al-Risalah, 1993.
- ....., *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2007.
- Raminto dan Septi Antik Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka belajar, 2005.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali pers, 2016.
- Saeed Abdullah, *Menyoal Bank Syariah, Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharwardi K Lubin, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Shalah Al-Shawi, Abdullah Al-Muslih, *Bungan Bank Haram, Menyikapi Fatwa MUI, Menuntaskan Kegamangan Umat*, Jakarta: Darul Haq, 2003.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Membumikan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1993.
- ....., *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan, 1998.

Suharto, Frento T, *Menambang Kekayaan dari Bisnis Emas Tanpa Mengeruk Alam*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2014.

....., *Harga Emas Naik atau Turun Kita Tetap Untung*, Jakarta: Kompas Gramedia: 2013.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet 1-2, Jakarta: PT Raya Grafindo Persada, 2005.

Sulaiman Al-mani', Syekh Abdullah, *Buhuts fi Al-Iqtishad Al-Islamiy*, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1996.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syarifudin Amir, *Garis-garis besar Fiqh*, Bogor: Prenada Media, 2003.

Syafputri Ella, *Investasi Emas, Dinar, dan Dirham*, Jakarta: Penebar Plus, 2012.

Tim Primapena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Gita Media Press

Utsmani, Muhammad Taqi, *The Text of Historical Judgement on Riba*, Kuala Lumpur: The Other Press, 2001.

Wahab, Muhammad Abdullah, *Fikih Muamalah*, Jakarta Selatan: Sinar Grafika, 2018.

Zuhdi, Masfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1994.

### **Wawancara**

Agung, Wawancara dengan Penulis, Kota Agung Tanggamus, 21 Februari 2020.

Aldian, Wawancara dengan Penulis, Kota Agung Tanggamus, 21 Februari 2020.

Ani Sari, Wawancara dengan Penulis, Kota Agung Tanggamus, 05 Agustus 2020.

Amsah, Wawancara dengan Penulis, Kota Agung Tanggamus, 18 Februari 2020.

Asih, Wawancara dengan Konsumen, Kota Agung Tanggamus, 06 Agustus 2020.

Endang, Wawancara dengan Penulis, Kota Agung Tanggamus, 21 Februari 2020.

Lina, Wawancara dengan Penulis, Kota Agung Tanggamus, 21 Februari 2020.

Listiani, Wawancara dengan Penulis, Kota Agung Tanggamus, 24 Februari 2020

Masripah, Wawancara dengan Penulis, Kota Agung Tanggamus, 24 Februari 2020

Neneng, Wawancara dengan Penulis, Kota Agung Tanggamus, 21 Februari 2020.

Ningsih, Wawancara dengan Penulis, Kota Agung Tanggamus, 05 Agustus 2020.

Nurhasanah, Wawancara dengan Penulis, Kota Agung Tanggamus, 05 Agustus 2020.

Putri, Wawancara dengan Penulis, Kota Agung Tanggamus, 05 Agustus 2020

Selimi, Wawancara dengan Penulis, Kota Agung Tanggamus, 21 Februari 2020.

Suhaida, Wawancara dengan Penulis, Kota Agung Tanggamus, 24 Februari 2020.

Susanti, Wawancara dengan Penulis, Kota Agung Tanggamus, 05 Agustus 2020.

Sumiyati, Wawancara dengan Konsumen, Kota Agung Tanggamus, 06 Agustus 2020.

Usman, Wawancara dengan Penulis, Kota Agung Tanggamus, 21 Februari 2020.

**Sumber *on-Line***

(Online), Tersedia di: <https://id.Wikipedia.Org/Wiki/Sampel> (Statistika). (12 Oktober 2019).

